



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT TIM
PELAKSANA EITI**

- Hari/Tanggal : Senin, 5 Desember 2016
Waktu : 13.30 – 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana
Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
- Agenda : 1. Presentasi *Independent Administrator* (IA) untuk Penyelesaian Laporan EITI 2014
2. Persetujuan Pengajuan Penambahan Batas Waktu Penyelesaian Laporan EITI 2014 ke EITI Internasional
3. Pembahasan Draft Roadmap *Beneficial Ownership*
4. Pembahasan Rencana Pilot *Commodity Trading*
5. Penyampaian Perkembangan Portal Data EITI
- Peserta Rapat Pemerintah : 1. Kementerian Perekonomian, Deputi III: Montty Giriana, Bastian H
2. Ditjen Migas, Kementerian ESDM : Tunggal
3. Setjen ESDM : Ira Handayani
4. Ditjen Pajak, Kemenkeu : Ahmad Zaky Zamani, Chenris C
4. Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu: Adijanto, Sigit Harjanto
5. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu: Reza Isman, Mulyono
6. Ditjen Anggaran: Kemenkeu: Evi Karmilah, Jack Subarja
7. BPKP: Setiawan J, Hendro NS
8. Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri: sofyan, Gerry JO
9. SKK Migas: Selvi, Runi nareswari, Adi Nugroho
- Pemerintah Daerah : Sekda Kaltim: Bantolo, Amrullah
- Asosiasi Industri dan Perusahaan : APBI-ICMA: Hendra Sinadia
IMA : Mukhlis
Pertamina: Ari Marsudi, Wisnu Santoso, Adrian, yogi, sri Hartati, Ahmad Tito
- Masyarakat Sipil : PWYP: Aryanto, Asri Nuraeni, Meliana
- Bank Dunia : Prasetya D
- Sekretariat EITI : Edi Effendi, Ronald Tambunan, Agus Trianto, Doni Erlangga, Andrian, Anggi Gartika
- Ernst and Young (EY) : Bangkit K, Izhari, Liliana, Dwi Wijayanti, Dinar, Ika M, Inez, Antania, David

A. PEMBUKAAN

Pembukaan disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana EITI, Bpk Montty Giriana : Menyampaikan bahwa Rapat Tim Pelaksana EITI yang dilaksanakan adalah yang ke-3 kalinya dilaksanakan di tahun 2016. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan administrasi di internal EITI yang menyebabkan mundurnya penyelesaian Laporan EITI 2014. Tahun depan diharapkan Rapat Tim Pelaksana EITI akan lebih sering dilaksanakan. Bpk Montty mempersilahkan Bpk Edi Effendi dari Sekretariat EITI untuk memberikan penjelasan terkait beberapa Agenda yang akan dibahas dalam Ratimlak.

B. PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN & TANGGAPAN

Bpk Edi menyampaikan kronologi proses perekrutan *Independent Administrator* (IA) yang dimulai sebelum lebaran lalu. Yang ditunjuk sebagai IA adalah PT Ernst and Young (EY) dan akan melaksanakan penyelesaian Laporan EITI 2014 selama 11 minggu atau 2 setengah bulan, yang dimulai tanggal 5 Desember 2016 – 20 Februari 2017.

1. Presentasi *Independent Administrator* (IA) untuk Penyelesaian Laporan EITI 2014

Bpk Bangkit Kuncoro dari EY memperkenalkan Tim yang akan bekerja untuk menyelesaikan laporan EITI 2014. Scope dari penyusunan Laporan 2014 yaitu melakukan riset, menyelesaikan laporan kontekstual, rekonsiliasi data, menyelesaikan laporan rekonsiliasi (120 perusahaan minerba, dan 72 perusahaan migas), dan menyelesaikan ringkasan Laporan EITI.

Bpk Izhari dari EY : Tahap penyelesaian laporan yaitu: *preliminary analysis*, pengumpulan data, rekonsiliasi, investigasi *discrepancy*, dan laporan final. Saat ini yang dilakukan adalah tahap awal dari penyelesaian laporan dan menentukan rekomendasi awal untuk laporan kontekstual.

Ibu Dwi dari EY: Akan mengadakan sosialisasi dari kontraktor (K3S) untuk menjelaskan template dan cara pengisian laporan EITI, *data collection* dengan mengirimkan template ke perusahaan dan instansi pemerintah. Dari form tersebut akan direkonsiliasi, kemudian akan dianalisis apabila ada *discrepancy*. Dari *discrepancy* tersebut akan ditentukan kesimpulan dan rekomendasi.

Ibu Lily dari EY: Timeline dibagi 5 bagian.

1. *Preleminary analysis* akan diselesaikan 2 minggu, akan dilaksanakan sosialisasi ke perusahaan akan dilaksanakan 13 desember 2016. *Inception report* diperkirakan selesai tanggal 19 Desember.
2. Data collection: Draft pertama 2 januari 2017
3. *Initial Reconciliation Report*: 23 Januari 2017
4. *Investigasi discrepancy*.
Penyelesaian draft laporan EITI akan diselesaikan 13 Februari 2017
5. Laporan final versi bahasa inggris akan diselesaikan 24 Februari 2017.

Tanggapan:

Bpk Montty: Karena waktu penyelesaian yang sangat pendek, EY harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan beberapa instansi seperti SKK Migas dan Ditjen Minerba.

Bpk Edi: Waktu penyelesaian sangat pendek, tapi Sekretariat EITI sudah menyiapkan surat pengantar dari SKK Migas dan Ditjen Minerba. Tanggal 13 Desember 2016 akan dilaksanakan sosialisasi perusahaan yang akan dibagi menjadi 4 sesi yaitu 2 sesi untuk perusahaan minerba dan 2 sesi untuk perusahaan migas.

Bpk Montty: Tahun lalu ada sekitar 21 perusahaan yang tak lapor. Dalam penyelesaian laporan kali ini, data-data yang di daerah bisa didatangi agar lebih cepat seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

Bpk Edi: Salah satu hambatan dari pembukaan data pajak adalah data pajak tidak bisa dibuka tanpa persetujuan perusahaan. Tanpa persetujuan perusahaan, data pajak bisa dibuka apabila ada *Letter of Authorization* (LOA) dari menteri keuangan. Apabila masih memungkinkan, LOA akan diusahakan.

Bpk Adijanto dari Ditjen Perbendaharaan: Data yang digunakan harus ada basis legal yaitu telah ada di LKPP, untuk data 2014 sudah ada legal basis. Pada tanggal 8 Desember 2016, Ditjen Perbendaharaan akan mengundang EY dan Sekretariat EITI untuk menentukan format template karena apabila setiap IA yang ditunjuk berbeda template akan menyulitkan.

Bpk Aryanto dari PWYP: Pengalaman tahun lalu tahap *preliminary* hingga *inception report* memakan waktu lama. Untuk kali ini harus dipastikan agar bisa lebih cepat.

Bpk Montty: File-file lama yang menunjukkan berbagai permasalahan bisa dipelajari lagi.

2. Persetujuan Pengajuan Penambahan Batas Waktu Penyelesaian Laporan EITI 2014 ke EITI Internasional

Bpk Edi: laporan EITI 2014 baru akan diselesaikan oleh IA, apabila Laporan tak selesai pada akhir desember 2016, Indonesia otomatis disuspend dari keanggotaan EITI. Agar Indonesia tak terkena suspend, Indonesia akan segera mengajukan perpanjangan batas waktu penyelesaian Laporan EITI 2014. Diharapkan pada saat EITI Board Meeting tanggal 8-9 Maret 2017 Laporan telah selesai. EY harus bisa menyelesaikan laporan EITI di akhir Februari 2017. Sampai saat ini, belum pernah ada negara yang disetujui dalam pengajuan perpanjangan batas waktu penyelesaian laporan EITI.

Bpk Aryanto: Alasan pengajuan perpanjangan harus logis dengan menyerahkan hasil dari Laporan EITI 2014 yang telah dikerjakan. Selain itu, pengajuan harus mencantumkan hal-hal yang positif yang telah dilakukan seperti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi laporan EITI 2012-2013, *Beneficial Ownership*, dan *Commodity Trading*.

Bpk Adijanto: Tahun depan disarankan langsung menyelesaikan 2 laporan yaitu 2015-2016 karena laporan dari LKPP sebagai dasar Laporan EITI telah selesai. Hal ini bisa dilakukan kalau anggaran tersedia.

3. Pembahasan Draft Roadmap *Beneficial Ownership* (BO)

Bpk Edi menyampaikan EITI telah bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya dalam penyelesaian *roadmap Beneficial Ownership* (BO) agar kedepannya roadmap tersebut dapat diimplementasikan. PPATK sedang dalam proses mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) terkait BO, karena untuk mengajukan Undang-Undang prosesnya sangat panjang. Bpk Edi mempersilahkan Bpk Sanji yaitu konsultan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mempresentasikan draft roadmap BO,

Bpk Sanji: BO mulai mendapat perhatian pemerintah setelah ada kasus Panama Papers. Negara yang telah melaksanakan transparansi BO baru Inggris karena BO merupakan hal yang baru. Di Indonesia transparansi BO masih setengah-setengah karena baru direncanakan di beberapa instansi, sedangkan di Kementerian Hukum dan HAM belum ada yang mengatur tentang BO.

Timeline Strategi dari roadmap BO:

- Tahap 1: 2017-2018: Definisi BO dan Studi-Studi Terkait Penerapan Transparansi Informasi BO
- Tahap 2: 2017-2018: Pengembangan Kerangka Institusi dan Hukum Transparansi BO
- Tahap 3: 2019: Implementasi Transparansi BO di Sektor Ekstraktif

Tanggapan:

Bpk Edi: Idealnya untuk transparansi BO harus ada dasar hukum yaitu Undang-Undang seperti di Inggris, namun untuk mengajukan Undang-Undang di Indonesia sangat sulit untuk selesai di tahun 2019, sehingga lebih baik dengan peraturan setingkat di bawahnya yaitu Perpres seperti yang dilakukan PPATK.

Draft roadmap yang telah diselesaikan akan dikirimkan lewat email ke anggota Tim Pelaksana untuk mendapatkan masukan. Masukan dan tanggapan diharapkan seminggu setelah rapat Tim Pelaksana.

4. Pembahasan Rencana Pilot *Commodity Trading*

Bpk Edi: Ibu Selvi dari SKK Migas telah mengikuti diskusi tentang *guidance* dari pelaksanaan *Commodity Trading*. EITI Indonesia juga telah melakukan diskusi awal dengan Sekretariat EITI Internasional untuk rencana pelaksanaan pilot *Commodity Trading*.

Bpk Montty: TOR yang sudah ada lebih baik dikirimkan ke anggota Tim Pelaksana.

Bpk Edi: Pelaksanaan pilot *Commodity Trading* akan dilaksanakan mulai tahun 2017, namun TOR bisa mulai dikirimkan ke anggota Tim Pelaksana untuk mendapatkan tanggapan.

Ibu Selvi (SKK Migas): Pilot *Commodity Trading* terfokus pada penjualan minyak dari bagian yang dijual pemerintah. *Guidance* untuk *Commodity Trading* masih dalam proses penyelesaian. *Effort* untuk melakukan transparansi *Commodity Trading* berdasarkan *guidance* masih terlalu besar bila dibandingkan dengan keuntungan/benefit yang diperoleh.

Bpk Montty: Sebelum standar tentang *Commodity Trading* dilaksanakan, EITI Indonesia bisa berperan dan memiliki kesempatan untuk menentukan *guidance*. Di agenda rapat-rapat skala Internasional, EITI Indonesia bisa memulai untuk mempresentasikan tentang *Commodity Trading*.

Bpk Edi: Mulai tahun 2017, kita akan berdiskusi lebih dalam dengan stakeholder yang berhubungan dengan *Commodity Trading* seperti Pertamina, SKK Migas, dan stakeholder lainnya.

Bpk Aryanto: TOR dan materi lainnya bisa dikirimkan ke anggota Tim Pelaksana untuk mendapatkan masukan untuk *guidance*.

5. Penyampaian Perkembangan Portal Data EITI

Bpk Edi: EITI Indonesia dengan dukungan dari Bank Dunia telah menyiapkan portal data EITI. Setelah selesai, yang akan menjadi host dari Portal Data tersebut yaitu Bagian Perencanaan Kemenko Perekonomian.

Bpk Montty: Sebaiknya Portal Data tersebut bisa terhubung dengan link dari Ditjen Minerba, SKK Migas dll

Ibu Selvi: Hal ini juga menjadi concern dari Kepala SKK Migas sehingga akan di link dengan SKK Migas.

Bpk Adijanto: Apabila memungkinkan, Tim Pelaksana mendapatkan akses sementara untuk memberikan masukan.

Prasetya (Bank Dunia): Pengembangan Portal data EITI akan tergantung dari Tim Pelaksana dan Sekretariat EITI. Karena kontrak Databot sebagai vendor hanya mengerjakan selesai sampai Versi 1. Namun semua masukan akan diusahakan untuk diakomodir.

Bpk Aryanto: Lebih baik melakukan diskusi dengan Pusdatim agar tak terjadi kebingungan dengan tumpang tindih data.

Bpk Prasetya: Portal Data memang tak dibuat untuk lengkap, hanya merupakan etalase dan integrasi data.

Ibu Selvi. Karena standar EITI berkembang terus, jangan sampai Portal Data mati dan harus diupdate terus.

Bpk Prasetya: Portal data akan diserahkan ke Kemenko Perekonomian, pengembangan ada di keputusan Tim Pelaksana.

C. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

Hal yang telah disepakati :

1. Tim Pelaksana menyetujui PT Ernst and Young (EY) menjadi *Independent Administrator* (IA) dan akan mengerjakan Laporan EITI 2014 selama dua setengah bulan atau sampai akhir Februari 2017.
2. Tim Pelaksana menyetujui Indonesia untuk mengajukan perpanjangan batas waktu penyelesaian Laporan EITI 2014 dengan mencantumkan kronologis yang menyebabkan Indonesia tak berhasil menyelesaikan Laporan EITI 2014 di akhir tahun 2016.
3. Draft roadmap BO akan dikirimkan ke anggota Tim Pelaksana untuk mendapatkan masukan. Masukan dan tanggapan diharapkan dapat diterima seminggu setelah Rapat Tim Pelaksana.
4. TOR tentang Commodity Trading akan dikirimkan ke Anggota Tim Pelaksana untuk memberikan masukan tentang guidance Pilot Commodity Trading.
5. Masukan Data Portal EITI dari user consultation akan diusahakan untuk diakomodir. Portal Data EITI akan diserahkan ke Kemenko Perekonomian dan pengembangannya tergantung pada Tim Pelaksana EITI.